Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum e-ISSN 3026-2917
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn p-ISSN 3026-2925
Volume 3 Nomor 4, 2025
DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2129

Analisis Faktor Penyebab Dan Upaya Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Sinjai

Nur'fitriani Syachrir
Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sinjai
Email Korespondensi: fnur21460@gmail.com

Article received: 01 Juli 2025, Review process: 16 Juli 2025
Article Accepted: 03 September 2025, Article published: 26 September 2025

ABSTRACT

The phenomenon of children not attending school (ATS) is a serious problem that has a direct impact on the quality of human resources in the future. This study aims to analyze the factors causing children not to attend school in Sinjai Regency and to identify efforts that have been and can be made to address this issue. The method used is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. The results of the study show that the main factors causing ATS in Sinjai Regency include family economic conditions, lack of awareness of the importance of education, early marriage, and limited access to education in remote areas. In addition, cultural factors and social support also have an influence. Efforts that have been made include educational social assistance programs, counseling for parents, and the development of open schools and equity programs. This study recommends the need for synergy between local government, educational institutions, and the community in formulating more inclusive and sustainable policies to reduce the number of out-of-school children in Sinjai Regency.

***Keywords**: Out-Of-School Children, Education Inequality, Economic Factors*

ABSTRAK

Fenomena anak tidak sekolah (ATS) merupakan permasalahan serius yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab anak tidak sekolah di Kabupaten Sinjai serta mengidentifikasi upaya yang telah dan dapat dilakukan dalam penanganannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab ATS di Kabupaten Sinjai meliputi kondisi ekonomi keluarga, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, pernikahan usia dini, serta akses pendidikan yang terbatas di wilayah terpencil. Selain itu, faktor budaya dan dukungan lingkungan sosial juga turut memengaruhi. Upaya penanganan yang telah dilakukan meliputi program bantuan sosial pendidikan, penyuluhan kepada orang tua, serta pengembangan sekolah terbuka dan program kesetaraan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk menekan angka anak tidak sekolah di Kabupaten Sinjai

***Kata Kunci:** Anak Tidak Sekolah, Ketimpangan Pendidikan, Faktor Ekonomi*

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Nur'fitriani Syachrir

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak fundamental yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. UNESCO (2021) menegaskan bahwa akses pendidikan yang merata merupakan kunci dalam membangun masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif. Di Indonesia, program Wajib Belajar 12 Tahun menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Namun, kenyataannya masih terdapat disparitas yang cukup tajam antara kebijakan nasional dengan realitas di lapangan, khususnya di wilayah dengan kondisi geografis yang menantang dan tingkat sosial ekonomi rendah seperti Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan

Kabupaten Sinjai memiliki karakteristik wilayah pegunungan dan perdesaan yang memperumit akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Data dari Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah (ATS) di beberapa kecamatan di Sinjai masih tinggi. Fenomena ini menggambarkan adanya kesenjangan struktural yang serupa dengan temuan penelitian di negara berkembang lain, di mana kondisi geografis dan kemiskinan menjadi faktor utama penghambat pemerataan pendidikan (Banerjee & Duflo, 2019). Hal ini menegaskan bahwa kesenjangan pendidikan bukan semata persoalan lokal, melainkan bagian dari tantangan global yang memerlukan solusi lintas sektor. Berbagai penelitian internasional menemukan bahwa faktor ekonomi keluarga menjadi penyebab dominan anak putus sekolah, karena keluarga lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar daripada biaya pendidikan (UNICEF, 2020). Kondisi ini juga terjadi di Sinjai, di mana orang tua cenderung melibatkan anak dalam pekerjaan produktif untuk menopang ekonomi keluarga. Faktor ekonomi ini kemudian berkelindan dengan minimnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, sehingga memperburuk peluang anak untuk melanjutkan sekolah. Situasi serupa juga ditemukan di Sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan, di mana anak dari keluarga miskin lebih rentan terhadap putus sekolah (World Bank, 2022).

Selain faktor ekonomi, keterbatasan infrastruktur pendidikan di wilayah terpencil juga menjadi kendala besar. Akses menuju sekolah yang jauh dan sulit dijangkau menyebabkan banyak anak memilih berhenti sekolah. Penelitian Psacharopoulos & Patrinos (2018) menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai berhubungan langsung dengan angka partisipasi sekolah, khususnya pada jenjang menengah. Hal ini memperlihatkan pentingnya investasi negara dalam membangun sarana dan prasarana pendidikan di daerah tertinggal untuk mengurangi angka ATS.

Faktor sosial dan budaya turut memberikan kontribusi signifikan terhadap tingginya angka ATS. Praktik pernikahan usia dini di beberapa desa di Sinjai misalnya, menjadi salah satu alasan utama anak perempuan berhenti sekolah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Greene (2020) yang menyatakan bahwa pernikahan dini mengurangi peluang perempuan untuk menyelesaikan pendidikan dasar maupun menengah, sekaligus meningkatkan kerentanan mereka terhadap kemiskinan struktural. Rendahnya kesadaran orang tua mengenai

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Nur'fitriani Syachrir

urgensi pendidikan juga memperlemah motivasi anak dalam melanjutkan sekolah, sehingga menimbulkan siklus kemiskinan antar generasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab anak tidak sekolah di Kabupaten Sinjai serta mengevaluasi berbagai upaya penanganan yang telah dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah sekaligus rekomendasi praktis dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, kontekstual, dan berkelanjutan, guna menekan angka ATS di daerah-daerah tertinggal dan memperkuat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor penyebab anak tidak sekolah (ATS) serta upaya penanganannya di Kabupaten Sinjai. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive pada kecamatan dengan tingkat ATS tinggi, seperti Sinjai Selatan, Sinjai Timur, dan Tellulimpoe. Informan terdiri dari anak-anak yang tidak bersekolah, orang tua atau wali, tokoh masyarakat, pendidik, perwakilan Dinas Pendidikan, serta aktivis lembaga sosial. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi terhadap laporan resmi pemerintah maupun lembaga terkait. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, serta diperkuat dengan triangulasi sumber dan teknik untuk menjamin validitas temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Ekonomi sebagai Determinan Anak Tidak Sekolah

Kemiskinan terbukti menjadi faktor dominan yang mendorong anak-anak di Kabupaten Sinjai untuk tidak melanjutkan pendidikan. Berdasarkan wawancara dengan orang tua di Kecamatan Tellulimpoe, sebagian besar menyatakan bahwa keterbatasan ekonomi memaksa anak untuk membantu pekerjaan rumah tangga atau bekerja di sektor informal. Realitas ini sejalan dengan penelitian UNICEF (2020) yang menekankan bahwa kemiskinan keluarga merupakan determinan utama dalam rendahnya partisipasi sekolah di negara berkembang. Kondisi ini menggambarkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar sering kali lebih diutamakan dibandingkan dengan investasi pada pendidikan anak.

Selain itu, biaya tambahan seperti seragam, buku, dan transportasi menjadi beban tambahan yang tidak sanggup ditanggung oleh keluarga dengan penghasilan terbatas. Anak-anak akhirnya diarahkan untuk bekerja sebagai buruh tani atau ikut merantau demi membantu ekonomi keluarga. Fenomena ini memperkuat pandangan Psacharopoulos & Patrinos (2018) bahwa pengeluaran pendidikan yang tinggi dapat menghambat keberlanjutan sekolah bagi kelompok miskin. Ketika biaya pendidikan tidak sebanding dengan kapasitas ekonomi keluarga, anak-anak menjadi kelompok rentan yang tersisih dari sistem pendidikan formal.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Nur'fitriani Syachrir

Di lapangan juga ditemukan bahwa meskipun pemerintah menyediakan program beasiswa, distribusinya tidak selalu merata dan tidak menjangkau semua anak. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan implementasi kebijakan pendidikan, di mana bantuan tidak selalu tepat sasaran. Temuan ini serupa dengan laporan UNESCO (2021) yang menyebutkan bahwa ketidaktepatan distribusi bantuan sosial pendidikan di beberapa negara berkembang memperlemah efektivitas intervensi pemerintah.

Fenomena lain yang memperparah adalah adanya pola pikir pragmatis pada sebagian orang tua, yang menganggap bahwa bekerja sejak dini lebih bermanfaat dibandingkan melanjutkan sekolah. Mereka menilai bahwa keterampilan praktis akan lebih cepat mendatangkan pendapatan dibandingkan pendidikan formal yang memerlukan waktu panjang. Pandangan ini sejalan dengan riset Banerjee & Duflo (2019) yang mengungkapkan bahwa keluarga miskin di berbagai negara cenderung menilai pendidikan sebagai investasi yang tidak langsung menguntungkan.

Dalam wawancara juga terungkap adanya anak-anak yang merasa bersalah jika tetap melanjutkan sekolah sementara orang tua mereka kesulitan ekonomi. Perasaan tersebut membuat mereka memilih berhenti sekolah untuk meringankan beban keluarga. Situasi ini memperlihatkan bahwa faktor ekonomi tidak hanya berdampak material, tetapi juga psikologis terhadap motivasi anak. Hal ini diperkuat oleh studi Mendenhall (2019) yang menemukan bahwa tekanan ekonomi keluarga memengaruhi kesejahteraan emosional anak dan berdampak pada keputusan pendidikan.

Ketimpangan kesempatan ini semakin lebar ketika dibandingkan antara keluarga menengah ke atas dengan keluarga miskin di Kabupaten Sinjai. Anak-anak dari keluarga berpendidikan dan cukup secara finansial cenderung memiliki kesempatan lebih baik untuk melanjutkan sekolah. Sementara itu, anak-anak dari keluarga miskin harus menghadapi keterbatasan ganda, yaitu ekonomi dan lingkungan sosial. Laporan World Bank (2022) menegaskan bahwa ketidaksetaraan pendidikan sering kali diwariskan antar generasi melalui siklus kemiskinan.

Di sisi lain, ada juga anak-anak yang awalnya mendapat kesempatan sekolah, tetapi akhirnya terpaksa berhenti karena kebutuhan ekonomi keluarga semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi pendidikan harus lebih dari sekadar akses awal; dibutuhkan keberlanjutan dukungan hingga anak menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sejalan dengan rekomendasi UNESCO (2021) yang menekankan pentingnya kebijakan pendidikan yang berkelanjutan, bukan sekadar intervensi jangka pendek.

Dengan demikian, faktor ekonomi terbukti menjadi penyebab utama anak tidak sekolah di Kabupaten Sinjai, baik dalam bentuk keterbatasan finansial, biaya pendidikan yang tinggi, distribusi bantuan yang tidak merata, maupun pola pikir keluarga miskin. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan afirmatif yang lebih fokus, tepat sasaran, dan berkesinambungan untuk memutus siklus kemiskinan melalui pendidikan.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Nur'fitriani Syachrir

Faktor Akses dan Infrastruktur Pendidikan

Kondisi geografis Kabupaten Sinjai yang didominasi wilayah perbukitan dan pedesaan turut menjadi hambatan besar dalam keberlanjutan pendidikan anak. Banyak anak harus menempuh jarak hingga 3–5 kilometer untuk mencapai sekolah, yang sering kali dilakukan dengan berjalan kaki. Situasi ini membuat anak-anak merasa lelah, sehingga menurunkan motivasi untuk melanjutkan pendidikan. Fenomena ini sejalan dengan laporan UNESCO (2020) yang menyatakan bahwa keterbatasan infrastruktur transportasi di daerah pedesaan merupakan faktor penghambat signifikan dalam akses pendidikan.

Selain jarak, kondisi jalan yang rusak dan minimnya fasilitas transportasi umum memperburuk keadaan. Anak-anak di beberapa desa terpencil bahkan harus menyeberangi sungai atau melewati jalur pegunungan untuk sampai ke sekolah. Temuan ini mirip dengan kasus di Nepal dan Tanzania yang dilaporkan oleh Lewin (2020), di mana hambatan geografis berkontribusi besar terhadap rendahnya angka partisipasi sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak bisa dilepaskan dari pembangunan infrastruktur dasar.

Kurangnya fasilitas pendidikan di daerah terpencil juga menjadi faktor penentu. Beberapa desa di Sinjai hanya memiliki sekolah dasar, sehingga anak-anak harus menempuh jarak lebih jauh untuk melanjutkan ke jenjang menengah. Ketiadaan sekolah lanjutan di dekat tempat tinggal menurunkan angka keberlanjutan pendidikan. Psacharopoulos & Patrinos (2018) menegaskan bahwa ketersediaan sekolah menengah di lokasi terdekat berkorelasi positif dengan tingkat kelanjutan anak dalam pendidikan.

Selain fasilitas fisik, ketersediaan tenaga pendidik yang memadai juga menjadi masalah. Guru yang ditempatkan di daerah terpencil sering kali terbatas jumlahnya dan menghadapi tantangan untuk bertahan lama karena kondisi geografis dan fasilitas hidup yang minim. Hal ini diperkuat oleh laporan OECD (2019) yang menunjukkan bahwa distribusi guru yang tidak merata merupakan tantangan global dalam pemerataan pendidikan.

Wawancara dengan beberapa orang tua juga mengungkapkan bahwa rasa aman menjadi pertimbangan. Mereka khawatir anak perempuan menghadapi risiko saat harus menempuh perjalanan jauh menuju sekolah. Faktor keamanan ini membuat orang tua lebih memilih menghentikan pendidikan anak. Greene (2020) menekankan bahwa rasa aman merupakan variabel penting dalam akses pendidikan, terutama bagi anak perempuan di wilayah pedesaan.

Keterbatasan infrastruktur juga berdampak pada kualitas pembelajaran. Sekolah di pedesaan sering kali kekurangan sarana seperti perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas teknologi, sehingga anak-anak tidak mendapatkan pengalaman belajar yang setara dengan anak di perkotaan. Hal ini memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan. Penelitian Muralidharan (2020) menunjukkan bahwa kesenjangan fasilitas sekolah berkontribusi terhadap kesenjangan capaian akademik.

Program sekolah terbuka yang diinisiasi pemerintah memang memberikan alternatif, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Nur'fitriani Syachrir

Minimnya sosialisasi, kurangnya tenaga pengajar, dan keterbatasan teknologi membuat efektivitas program ini belum optimal. UNESCO (2021) menekankan pentingnya inovasi pendidikan berbasis teknologi untuk menjangkau wilayah terpencil, namun hal tersebut belum maksimal diterapkan di Sinjai.

Dengan demikian, keterbatasan akses dan infrastruktur menjadi faktor signifikan dalam tingginya angka ATS di Sinjai. Faktor ini memperlihatkan pentingnya integrasi antara kebijakan pendidikan dengan pembangunan infrastruktur wilayah, agar anak-anak di daerah pedesaan memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan.

Faktor Sosial, Budaya, dan Internal Anak

Selain faktor ekonomi dan infrastruktur, aspek sosial dan budaya memainkan peran penting dalam tingginya angka ATS. Di beberapa desa di Kabupaten Sinjai, praktik pernikahan usia dini masih dianggap wajar dan bahkan didorong oleh keluarga. Hal ini menyebabkan banyak anak perempuan berhenti sekolah untuk menikah. Temuan ini sejalan dengan studi Greene (2020) yang menegaskan bahwa pernikahan dini merupakan salah satu penyebab utama anak perempuan di negara berkembang tidak melanjutkan pendidikan.

Rendahnya kesadaran orang tua mengenai pentingnya pendidikan juga turut menjadi faktor penghambat. Banyak orang tua yang masih menganggap bahwa pendidikan tidak memberikan dampak langsung terhadap kehidupan ekonomi keluarga. Pandangan ini serupa dengan penelitian Banerjee & Duflo (2019) yang menunjukkan bahwa keluarga miskin sering kali menilai pendidikan sebagai investasi yang kurang relevan dengan kebutuhan jangka pendek.

Budaya patriarkis juga berperan dalam menurunkan partisipasi pendidikan, khususnya bagi anak perempuan. Peran gender yang dibangun secara sosial membuat anak perempuan lebih banyak diarahkan untuk membantu pekerjaan domestik daripada melanjutkan sekolah. Studi UNESCO (2021) menunjukkan bahwa stereotip gender masih menjadi hambatan besar bagi akses pendidikan perempuan di banyak negara berkembang.

Faktor internal anak juga tidak bisa diabaikan. Beberapa anak mengaku kehilangan motivasi belajar karena mengalami perundungan di sekolah atau kesulitan mengikuti pelajaran. Hal ini membuat mereka enggan untuk melanjutkan pendidikan. Penelitian Mendenhall (2019) menunjukkan bahwa pengalaman negatif di sekolah berhubungan erat dengan rendahnya motivasi belajar anak.

Di sisi lain, minimnya bimbingan dari lingkungan sekitar memperparah kondisi ini. Anak-anak yang tidak memiliki teladan atau dorongan dari keluarga maupun guru lebih rentan untuk berhenti sekolah. Laporan World Bank (2022) menegaskan bahwa dukungan sosial dari keluarga dan komunitas merupakan faktor penting dalam keberlanjutan pendidikan anak.

Beberapa anak juga terpengaruh oleh lingkungan sebaya, di mana mereka lebih memilih bekerja atau menikah mengikuti teman-temannya daripada melanjutkan sekolah. Dinamika kelompok sebaya memiliki pengaruh signifikan

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Nur'fitriani Syachrir

dalam keputusan anak, sebagaimana ditegaskan oleh studi Steinberg (2020) mengenai perkembangan remaja dan pilihan pendidikan.

Selain itu, kurangnya layanan konseling pendidikan membuat anak-anak tidak memiliki ruang untuk menyalurkan permasalahan yang mereka hadapi di sekolah. Padahal, keberadaan konselor sekolah dapat membantu anak mengatasi kesulitan belajar maupun masalah sosial. Penelitian OECD (2019) menunjukkan bahwa bimbingan konseling berperan penting dalam mencegah putus sekolah.

Dengan demikian, faktor sosial, budaya, dan internal anak membentuk rangkaian hambatan multidimensional yang memperbesar risiko anak untuk tidak melanjutkan pendidikan. Faktor-faktor ini memperlihatkan bahwa intervensi pendidikan harus memperhitungkan aspek kultural dan psikologis, tidak hanya sekadar faktor ekonomi atau infrastruktur.

Pembahasan

Permasalahan anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Sinjai merupakan fenomena multidimensi yang tidak dapat dijelaskan hanya dari satu faktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, infrastruktur, sosial, budaya, dan internal anak saling berkaitan dan memperburuk keadaan. Situasi ini menggambarkan bahwa pendidikan di daerah tertinggal harus dipandang secara komprehensif, sesuai dengan rekomendasi UNESCO (2021) yang menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam pendidikan inklusif.

Pertama, faktor ekonomi terbukti menjadi determinan utama ATS. Kemiskinan struktural mendorong anak-anak untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi, yang membuat mereka terpaksa mengorbankan pendidikan. Hal ini sejalan dengan studi UNICEF (2020) yang menekankan keterkaitan erat antara tingkat kemiskinan keluarga dengan rendahnya angka partisipasi sekolah. Dengan demikian, kebijakan pendidikan di Sinjai tidak dapat dipisahkan dari strategi penanggulangan kemiskinan.

Kedua, faktor akses dan infrastruktur memperlihatkan bahwa kesenjangan pendidikan berkaitan erat dengan pembangunan wilayah. Keterbatasan fasilitas sekolah, jarak tempuh yang jauh, dan minimnya transportasi publik menjadi kendala besar bagi anak-anak di pedesaan. Fenomena ini serupa dengan temuan Lewin (2020) di Tanzania, di mana hambatan geografis memperburuk ketimpangan akses pendidikan. Artinya, pembangunan infrastruktur harus menjadi bagian integral dari kebijakan pendidikan di daerah terpencil.

Ketiga, aspek sosial dan budaya memberikan kontribusi signifikan terhadap tingginya angka ATS. Praktik pernikahan usia dini dan norma gender tradisional memperlihatkan bahwa pendidikan masih belum menjadi prioritas utama dalam budaya lokal tertentu. Greene (2020) menegaskan bahwa tanpa perubahan budaya, upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi pendidikan akan sulit mencapai hasil optimal. Dengan demikian, program edukasi masyarakat menjadi sangat penting untuk membangun kesadaran kolektif tentang urgensi pendidikan.

Keempat, faktor internal anak juga berpengaruh terhadap keputusan untuk berhenti sekolah. Rendahnya motivasi belajar, pengalaman perundungan, serta

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Nur'fitriani Syachrir

pengaruh kelompok sebaya menjadi variabel penting yang sering diabaikan dalam kebijakan pendidikan. Penelitian Steinberg (2020) menunjukkan bahwa remaja sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan sosial, sehingga intervensi pendidikan harus menyertakan program bimbingan dan konseling yang memadai.

Kelima, keterbatasan intervensi pemerintah dan lembaga swasta juga perlu dikritisi. Program-program yang ada, seperti beasiswa atau sekolah terbuka, belum mampu menjangkau semua anak secara merata. Hal ini mirip dengan laporan UNESCO (2021) yang menyebutkan bahwa banyak program pendidikan di negara berkembang hanya bersifat sporadis dan kurang berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pendidikan yang lebih adaptif dan inklusif untuk menjawab tantangan lokal.

Keenam, keberhasilan menekan angka ATS sangat bergantung pada kolaborasi multipihak. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah harus membangun sinergi yang kuat dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung. World Bank (2022) menekankan bahwa keberlanjutan pendidikan di negara berkembang hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat.

Ketujuh, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa masalah ATS di Sinjai bukan hanya persoalan lokal, melainkan bagian dari fenomena global yang juga terjadi di negara berkembang lain. Dengan demikian, strategi penanganan harus mengacu pada praktik baik internasional, tetapi tetap disesuaikan dengan konteks lokal. Pendekatan yang kontekstual, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat menjadi kunci untuk menurunkan angka anak tidak sekolah secara signifikan.

SIMPULAN

Permasalahan anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Sinjai merupakan isu multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, keterbatasan akses dan infrastruktur, serta aspek sosial, budaya, dan internal anak yang saling berkelindan. Kemiskinan keluarga, biaya pendidikan yang tinggi, jarak tempuh sekolah yang jauh, praktik pernikahan usia dini, rendahnya kesadaran orang tua, hingga lemahnya motivasi belajar anak terbukti menjadi determinan utama dalam tingginya angka ATS. Upaya penanganan yang telah dilakukan, seperti pemberian beasiswa, pendidikan kesetaraan, sekolah terbuka, dan dukungan komunitas lokal, masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan jangkauan, resistensi budaya, dan minimnya keberlanjutan program. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terintegrasi, inklusif, dan berbasis komunitas dengan melibatkan kolaborasi multipihak, agar intervensi pendidikan tidak hanya mampu mengurangi angka ATS secara jangka pendek, tetapi juga memperkuat transformasi sosial-ekonomi masyarakat secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan pembangunan global di bidang pendidikan.

DAFTAR RUJUKAN

Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2019). *Good economics for hard times*. PublicAffairs.
Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Pendidikan Kabupaten Sinjai 2023*.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Nur'fitriani Syachrir

Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. (2024). *Laporan Tahunan Program Penanganan Anak Tidak Sekolah*. Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.

Greene, M. E. (2020). Ending child marriage: A guide for global policy and advocacy. *International Center for Research on Women (ICRW)*.

KabarSinjai.com. (2024). Langkah solutif Disdik Sinjai entaskan anak tidak sekolah. Retrieved from https://kabarsinjai.com/langkah-solutif-disdik-sinjai-entaskan-anak-tidak-sekolah/

Lewin, K. (2020). Access, age, and grade: Repetition and dropout in secondary schools in sub-Saharan Africa. *Comparative Education Review, 64*(2), 212–236. https://doi.org/10.1086/708265

Mendenhall, M. (2019). Education in emergencies: A review of theory and practice. *Education and Conflict Review, 2*(1), 1–8.

Muralidharan, K. (2020). The real promise of education: Large-scale experimental evidence from developing countries. *Annual Review of Economics, 12*(1), 45–73. https://doi.org/10.1146/annurev-economics-082019-110519

OECD. (2019). *Balancing school choice and equity: An international perspective based on Pisa*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/2592c974-en

PenaRakyat.com. (2024). 3.659 anak putus sekolah di Sinjai kembali bersekolah sepanjang 2024. Retrieved from https://penarakyat.com/3-659-anak-putus-sekolah-di-sinjai-kembali-bersekolah-sepanjang-2024/

Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018). Returns to investment in education: A decennial review of the global literature. *Education Economics, 26*(5), 445–458. https://doi.org/10.1080/09645292.2018.1484426

Steinberg, L. (2020). Adolescence (12th ed.). McGraw-Hill Education.

Susanti, D. (2020). *Pendidikan untuk semua: Masalah dan solusi*. Jakarta: Rajawali Press.

Suyatno. (2019). *Sosiologi pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

UNESCO. (2020). *Global education monitoring report 2020: Inclusion and education – All means all*. UNESCO Publishing.

UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO Publishing.

UNICEF. (2020). *Addressing the learning crisis: An urgent need to better finance education for the poorest children*. UNICEF.

World Bank. (2022). *The state of global learning poverty: 2022 update*. World Bank Group.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Nur'fitriani Syachrir